

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 02  
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA  
KANTOR CAMAT PANGEAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MIFTA HULJANNAH  
160412040**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 02  
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA  
KANTOR CAMAT PANGEAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**MIFTA HULJANNAH  
160412040**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020

LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN  
REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT PANGEAN

Disusun dan diajukan oleh :

MIFTA HULJANNAH  
NPM. 160412040

Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh komisi Pembimbing


Teluk Kuantan, 23 Oktober 2020

Pembimbing I



M. Irwan, SE., MM  
NIDN. 1012058301

Pembimbing II



Rina Andriani, SE., M.Si  
NIDN. 1003058501

Mengetahui,  
Ketua Prodi Studi Akuntansi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



Yul Emri Yulis, SE., M.Si  
NIDN. 1014038901

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

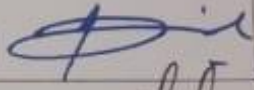
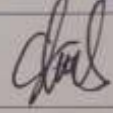
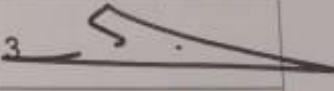
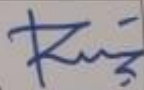
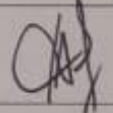

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN  
REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT PANGEAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**MIFTA HULJANNAH  
160412040**

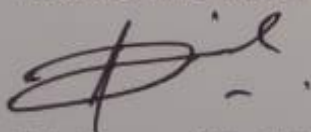
Telah dipertahankan dalam siding Ujian Skripsi  
Pada tanggal **23 Oktober 2020**  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua	1 
2	Dessy Kumala Dewi, SE.,MAK	Sekretaris	2 
3	M.irwan, SE.,MM	Anggota	3 
4	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota	4 
5	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota	5 
6	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota	6 

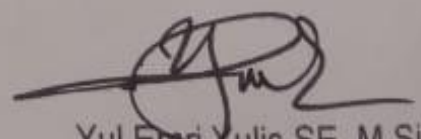
Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial



Zul Ammar, SE.,ME  
NIDN.1020088401

Ketua  
Program Studi Akuntansi



Yul Emri Yulis, SE.,M.Si  
NIDN.1014038901

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	MIFTA HULJANNAH
NPM	:	160412040
Program Studi	:	AKUNTANSI
Konsentrasi	:	AKUNTANSI KEUANGAN
Fakultas	:	ILMU SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Pangean.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 23 Oktober 2020



membuat pernyataan

MIFTA HULJANNAH  
NPM. 160412040

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat manusia terhadap kehidupan yang lebih baik serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Satandar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Pangean”** Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana S 1 Akuntansi Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis,MM Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., ME Selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku pembimbing II bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan di Univesitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kantor Camat Pangean atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Janriawan, SE selaku kasubag keuangan Kantor Camat Pangean yang telah membantu dalam memberikan semua perlengkapan penyelesaian skripsi.
9. Kedua Orang Tua serta Saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat dan doa serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan skripsi. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembangunan ilmu Akuntansi khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Islam Kuantan Singingi dimasa mendatang, Amin.

Teluk Kuantan, 23 Oktober 2020

Penulis

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO.02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT PANGEAN**

**Mifta Huljannah  
M. Irwan, SE., MM  
Rina Andriani, SE., M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun Kantor Camat Pangean sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komparatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang memdetail tentang latar belakang masalah pada subjek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder berupa laporan keuangan periode 2019 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor camat pangean yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Pasarbaru Pangean.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan LRA di Kantor Camat Pangean hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran, akan tetapi masih ada akun-akun yang tidak dicantumkan kedalam LRA diantaranya adalah akun pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, namun laporan keuangan telah dibuat dan disajikan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh sekelompok pengguna laporan keuangan guna mengambil suatu keputusan.

**Kata kunci:** PSAP No.02, Laporan Keuangan Pemerintah, Laporan Realisasi Anggaran.



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS STATEMENT (PSAP) NO.02 ON BUDGET REALIZATION REPORT IN THE CAMAT PANGEAN OFFICE**

**Mifta Huljannah  
M. Irwan, SE., MM  
Rina Andriani, SE., M.Si**

*This research aims to find out if the report on budget realization Camat Pangean Office is in accordance with the Statement of Government Accounting Standards Number 02 Government Regulation No. 71 of 2010. This type of research uses comparative descriptive research with the aim of providing a detailed picture of the background of the problem on the subject studied. The types of data used are primary data and skunder data in the form of financial statements for the period 2019 on the Budget Realization Report. Data collection techniques are carried out using observation techniques, interviews and documentation. This research was conducted at the Camat pangean office located at Jl. Jenderal Sudirman Pasarbaru Pangean.*

*The results of this study show that the Implementation of LRA in the Camat Pangean Office is almost entirely in accordance with PSAP No. 02 on the budget realization report, but there are still accounts that are not listed in the LRA including financing accounts and the remaining more/less budget financing, but financial statements have been made and presented in time so that it can be used by a group of financial report users to make a decision.*

**Keywords :** PSAP No.02, Government Financial Report, Budget Realization Report.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Masalah.....	5
1.3 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	8
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi .....	8
2.1.1.2 Pengertian Sektor Publik.....	9
2.1.2 Pengertian dan Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	9
2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	9
2.1.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	10
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah.....	13
2.1.4 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik .....	15
2.1.5 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah .....	16
2.1.6 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran .....	20
2.1.7 Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran .....	29
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30

2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu.....	35
3.3 Populasi dan Sampel.....	36
3.3.1 Populasi .....	36
3.3.2 Sampel.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	36
3.4.1 Jenis Data .....	36
3.4.2 Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6 Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	40
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Camat Pangean .....	41
4.1.2.1 Sejarah Pangean.....	41
4.1.2.2 Letak Geografis .....	43
4.1.2.3 Letak Demografi .....	43
4.2 Hasil Penelitian .....	48
4.2.1 Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Kantor Camat Pangean Periode 2019 .....	48
4.2.2 Analisis Laporan Realisasi Kantor Camat Pangean Periode 2019 .....	50
4.3 Pembahasan .....	53
4.3.1 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
5.1 Kesimpulan .....	59

5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	4
2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
3.1 Rincian Jadwal Penelitian .....	35
4.1 Nama Desa/Kelurahan.....	43
4.2 Analisis Laporan Realisasi Anggaran.....	49
4.3 Analisis Pendapatan LRA Periode 2019 .....	50
4.4 Analisis Belanja LRA Periode 2019 .....	51
4.5 Analisis Transfer LRA Periode 2019 .....	53
4.6 Analisis Surplus/Defisit LRA Periode 2019 .....	53
4.7 Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Pangean TA 2019 dengan PSAP No.02 .....	54

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 Struktur Organisasi .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Foto Saat Wawancara

Lampiran 6 : Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Standar ini dijadikan sebagai dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga, akuntabilitas laporan



tersebut dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan instansi dalam suatu instansi Pemerintah Daerah adakalanya memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Perbedaan ini tidak berarti menunjukkan bahwa daerah tersebut melakukan hal-hal yang berbeda dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya standar ini maka Laporan Keuangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut.

Dengan adanya Standar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang mengatur pelaporan keuangan seluruh Pemerintah Daerah, maka akan tercipta keseragaman dalam hal penyajian laporan keuangan, sehingga daya banding dalam penyajian laporan keuangan pun dapat tercipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 membuat laporan yang disusun menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama suatu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah pemerintah itu sendiri yang di gunakan dalam mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Pihak ekstern yang menggunakan informasi ini adalah Kreditur, Investor, Bank, Pemerintah dari daerah lain dari Negara Asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dan mengungkapkan kegiatan keuangannya dalam satu periode pelaporan. Perencanaan yang baik belum merupakan jaminan tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan berhasilnya suatu perencanaan kegiatan dapat dilihat dari informasi Laporan Realisasi Anggarannya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di atur didalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang di sajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos- pos antara lain: pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di atur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Standar ini dijadikan sebagai dasar penyajian laporan realisasi anggaran di pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga akuntabilitas laporan tersebut dapat di andalkan, serta memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan yang

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran**

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	0.00	0.00	-	0.00
Belanja	2,530,851,492.00	2,576,616,415.00	2,368,860,378.00	24.11
Transfer	-	-	-	-
Surplus/Defisit	(2,530,851,492.00)	(2,576,616,415.00)	(2,368,860,378.00)	(24.11)

Sumber : Kantor Camat Pangean. 2020

Masalah yang ditemukan pada Kantor Camat Pangean dalam penelitian ini adalah mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Karena didalam Laporan Realisasi Anggaran itu mencantumkan komponen akun yang diatur didalam PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. PSAP No.02 telah mengatur tata cara penyajian Laporan Realisasi Anggaran yaitu dengan mencantumkan 6(enam) komponen akun utama yaitu Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defiisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan Kantor Camat Pangean hanya

mencantumkan 4(empat) komponen saja, yaitu akun Pendapatan, Belanja, Transfer dan Surplus / Defisit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana penerapan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh kantor Camat Pangean berdasarkan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan mengangkat judul penelitian **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Camat Pangean”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

“Apakah penerapan laporan realisasi anggaran yang disusun Kantor Camat Pangean sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Kantor Camat Pangean sudah sesuai atau belum sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan penulis khususnya bagi ilmu akuntansi tentang Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Pangean.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Kantor Camat Pangean dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

#### **2. Bagi Akademisi**

Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka Skripsi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan hasil pendidikan kepada masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan/referensi, umumnya dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada Fakultas Ilmu Sosial Program studi Akuntansi pada umumnya dalam menganalisis Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

3. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi pihak instansi sebagai bahan pertimbangan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah bagi Kantor Camat Pangean dalam hal Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

**Pengertian Akuntansi Menurut Sumarsan (2013 : 1)** menjelaskan bahwa Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan Menurut Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dasar adalah sebagai berikut :“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan instansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **2.1.1.2 Pengertian Sektor Publik**

Sektor Publik adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan layanan pemerintah. Komposisi sektor publik bervariasi menurut Negara, tetapi di sebagian besar Negara sektor publik meliputi layanan polisi, miter, jalan umum, angkutan umum, pendidikan dasar dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sektor publik mungkin memberikan layanan yang non profit seperti penerangan jalan, layanan yang bermanfaat bagi semua masyarakat bukan hanya individu yang menggunakan layanan seperti pendidikan publik dan layanan yang mendorong kesempatan yang sama.

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk di dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, adapula yang menjalankan aktivitas lainnya seperti yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, partai politik, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

## **2.1.2 Pengertian dan Fungsi Anggaran Sektor Publik**

### **2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Munandar (2011) pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.



Sedangkan penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai, masing-masing kegiatan tersebut kemudian di kelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

#### **2.1.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa Fungsi utama (mardiasmo, 2009) adalah sebagai :

1. Alat perencanaan (*Planning tool*)

Anggaran di buat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah menyusun anggaran untuk merencanakan tindakan yang dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan hasil apa yang hendak di capai dari belanja pemerintah tersebut. Sebagai alat perencanaan, anggaran di susun agar kebijakan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Kebijakan anggaran tersebut berupa program dan kegiatan yang sesuai tujuan pemerintah dan dialokasikan pendanaannya beserta indikator kinerja dan target pencapaian strategis yang diharapkan.

2. Alat pengendali (*Control tool*)

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendali, diharapkan meminimalisir kesalahan alokasi anggaran seperti overspending atau underspending. Anggaran juga alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan

cara membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang dianggarkan, menghitung selisih anggaran, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan serta merevisi standar biaya atau target anggaran tahun berikutnya.

3. Alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran dapat digunakan untuk menstabilkan, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Alat penilaian kinerja (*Performance measurement tool*)

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Pengertian kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

5. Alat politik (*Political tool*)

Anggaran sektor publik disusun atas kesepakatan legislatif dan eksekutif. Dalam proses mencapai persetujuan anggaran publik diperlukan keahlian politik, negosiasi, koalisi dan pemahaman prosedur manajemen keuangan sektor publik. Anggaran yang telah disahkan merupakan dokumen publik yang harus dijalankan oleh eksekutif dengan sebaik-baiknya. Apabila anggaran tidak dilaksanakan dengan baik maka kredibilitas pemerintah dapat menurun dan instrumen anggaran dapat menjadi alat menekan pemerintahan. Minimal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

6. Alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and communication tool*)

Setiap unit kerja pemerintah secara berjenjang terlibat dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu anggaran perlu disusun dengan perencanaan dan koordinasi yang baik dalam suatu sistem terpadu. Hal ini dilakukan agar program dan rencana kerja anggaran dapat dipantau kinerjanya dan terhindar dari duplikasi. Kemudian agar program dan kegiatan yang disusun dalam anggaran dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dikomunikasikan ke seluruh unit dalam suatu organisasi.

7. Alat motivasi (*Motivation tool*)

Anggaran disusun dengan target yang terukur dan dapat dilaksanakan. Dalam perencanaan terdapat target dan tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu target yang hendak dicapai hendaknya tidak terlalu tinggi (ambisius) namun juga tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan. Informasi (input) yang diperoleh dari evaluasi kinerja anggaran juga dapat menjadi dasar pemberian insentif (stick and carrot) bagi pekerja.

8. Alat menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)

Seluruh komponen masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan anggaran sektor publik. Masyarakat umum, LSM, asosiasi dan akademisi dapat menyampaikan aspirasinya. Hal ini penting karena dalam pelaksanaannya anggaran berdampak langsung pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tugas pemangku kepentingan dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini dengan skala prioritas sesuai visi misi pemerintahan. Dengan terpenuhinya aspirasi mereka maka kondisi

bernegara dapat lebih baik dan terhindar dari demo dan kegaduhan politik yang menguras energi bangsa.

### **2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintahan di artikan sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas keuangan tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (yang selanjutnya di singkat SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar”.

Sedangkan Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010:137) yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010:139).

Dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak pihak diluar organisasi.

Beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan:

- 1) Memberi informasi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal hal yang berkaitan dengan perusahaan
- 2) Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validasi laporan keuangan
- 3) Memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variable yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya.
- 4) Menghasilkan prinsip prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi.

Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia dikeluarkan oleh Komite standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Dalam sejarah perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan di indonesia terdapat dua produk perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP N0 71 merupakan pengganti dari standar

akuntansi pemerintahan yang lama PP NO 24 2005 menggunakan pencatatan kas menuju akrual (*cash toward accrual*) sedangkan PP NO 71 tahun 2010 menggunakan basis pendekatan akrual (*full accrual*).

#### **2.1.4 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik**

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

### **2.1.5 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian (berbasis kas)

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## 2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi



kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

### 3) Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

### 4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

#### **2.1.6 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA : Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja : Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- 3) Transfer : Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) Surplus/defisit-LRA : Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA
- 5) Penerimaan Pembiayaan : Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan
  - a. Pengeluaran Pembiayaan : Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan
  - b. Pembiayaan Neto : Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu
- 6) Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) : Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran mengemukakan bahwa, dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi yang disusun antara lain:

- 1) Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan

meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

## 2) Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Jenis Pendapatan-LRA meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah

3) Hasil perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3) Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

4) Akuntansi Surplus / Defisit – LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### 1) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 2) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan- LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

3) Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

6) Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Berikut ini adalah format Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Format Laporan realisasi anggaran**

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Restribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
15	<b>Jumlah Pendapatan transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya ( 18 s/d 19)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
25	<b>Jumlah Transfer pemerintah provinsi ( 23 s/d 24)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
26	<b>Total pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah ( 29 s/d 31)</b>	XXX	XXX	XX	XXX

33	<b>Jumlah Pendapatan (27 + 26 = 32)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	Belanja Operasi	XXX	XXX	XX	XXX
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
41	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49	Belanja Jalan Irigasi dan Jalan	XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tak terduga	XXX	XXX	XX	XXX
56	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
58					
59	<b>TRANSFER</b>				
60	<b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>				
61	Bagi Hasil pajak	XXX	XXX	XX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XX	XXX
63	Bagi Hasil Pendaptan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
64	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (61 s/d 63)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
65					
66	<b>SURPLUS/DEVISIT (33 – 64)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
67					
68	<b>PEMBIAYAAN</b>				
69					
70	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
71	Penggunaan siLPA	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
73	Hasil Penjualan Kekayaan	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri - pemerintahan Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
75	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintahan Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
76	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga keuangan bank	XXX	XXX	XX	XXX
77	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
78	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX

79	Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
80	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
81	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintahan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
83	<b>Jumlah Penerimaan ( 71 s/d 82)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
84					
85	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b>	XXX	XXX	XX	XXX
86					
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Pemerintah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
92	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
93	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
94	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
95	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
96	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
97	<b>Jumlah Pengeluaran ( 86 s/d 96)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
98	<b>PEMBIAYAAN NETO (83 – 97)</b>	XXX	XXX	XX	XXX
99					
100	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( 66 + 98)</b>	XXX	XXX	XX	XXX

### 2.1.7 Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan di terima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komperatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- 1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) dan
- 3) Telah di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Maulida Oktafani (2011)	Hubungan penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkay kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada pemerintah kota Tangerang Selatan)	Hasil penelitian yang dilakukan melalui penerapan 56 evaluasi item PSAP No. 2, ada 34 item (60,71%) sesuai dengan yang laporan anggaran kota Tangerang Selatan telah memberikan informasi tentang anggaran keseluruhan dan berguna dalam mengevaluasi

			kinerja pemerintah, laporan realisasi juga telah memberikan informasi bahwa realisasi diimplementasikan sesuai dengan anggaran, meskipun ada perubahan dalam pelaksanaannya.
2.	Wulan Sari (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) PPNomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo	Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam perlakuan untuk pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3.	Melly Heriawati Simanihuruk (2013)	Penerapan PSAP No.2 PP No 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah memadai dan telah sesuai dengan PSAP No. 2 PP No 71 Tahun 2010.
4.	Siti Asmianti (2015)	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran yang telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 10,11, dan 14.
5.	Andre P. Tulangow (2016)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Hasil penelitian pada APBD Kabupaten Minahasa, menunjukan bahwa dalam

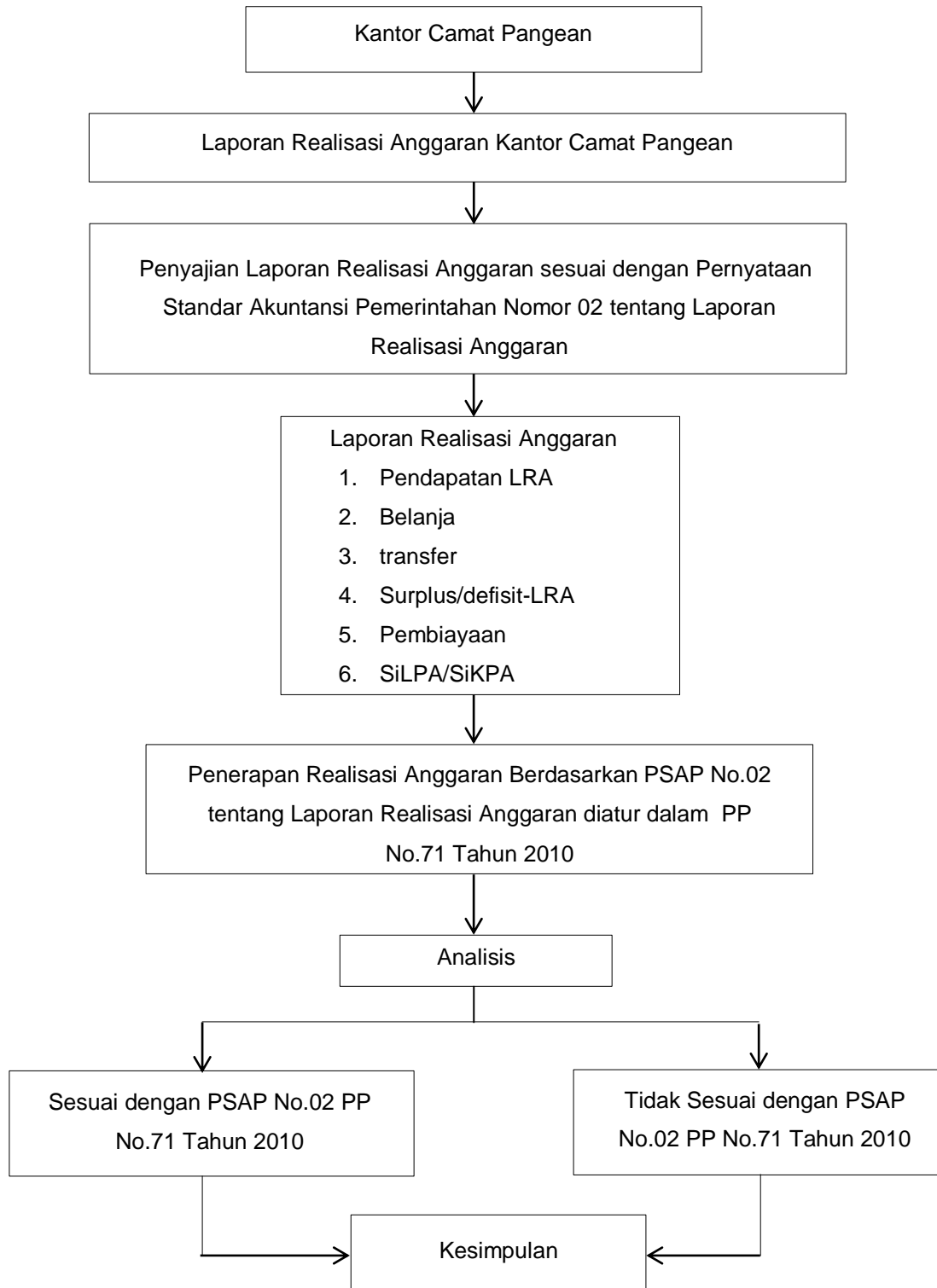
		Pemerintah Kabupaten Minahasa.	tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.
.	Cahaya Elbash (2016)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran.
7.	Yuni Maya Safira (2016)	Penerapan PSAP No 02 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi KAsus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)	Hasil penelitian ini bahwa Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Pasuruansesuai dengan PSAP Nomor 2, walaupun beberapa item belum diterapkan karena tidak adanya transaksi.
8.	Nurul Rahmi Sandya (2018)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, penyajian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71

		Provinsi Sumatera Utara.	Tahun 2010
9.	Arifah Yuniarti (2019)	Analisis Penerapan PSAP No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan LRA di Kabupaten Klaten hampir scara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02, hanya ada satu yang tidak sesuai yaitu transaksi dalam mata uang asing karena memang Kabupaten Klaten tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak asing.
10.	Paidi (2019)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 79% dan tingkat ketidaksesuaiannya mencapai 21% dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Adapun ketidak sesuaiannya karenan dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak menyajikan pos-pos pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran, tidak mencatat transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah, tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual.

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2020



### 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Arifah Yuniarti, 2019

### BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian atau desain penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif .

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran.

**Menurut Sugiyono (2012)** Penelitian komparatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

#### 3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Pangean yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 Pasarbaru Pangean. Penelitian ini dimulai sejak Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan					
		Mei 2020	Jun 2020	Jul 2020	Agu 2020	Sep 2020	Okt 2020
1.	Pra Survei						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Bimbingan						
4.	Seminar Proposal						
5.	Penelitian						
6.	Pengelolaan Data						
7.	Penulisan Hasil Penelitian						
8.	Perbaikan Skripsi						

9.	Ujian Komprehensif						
----	--------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Rincian Penelitian, 2020

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Menurut Morissan (2012 ; 19) Populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Sedangkan Menurut Mulyatiningsih (2011:19) Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan menjadi wilayah generalisasi kesimpulan hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Camat Pangean yaitu seluruh pegawai yang berada pada bagian keuangan yaitu sebanyak 3 orang.

#### **3.3.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel penelitian pada Kantor Camat Pangean yang berada pada bagian keuangan yaitu Kasubag Kauangan, Bendahara dan Pelaksana pada Kantor Camat Pangean dengan melakukan wawancara.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.4.1 Jenis Data Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian Komparatif. Menurut Sugiyono (2014:54) penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda.

Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kantor Camat Pangean periode 2019.

### **3.4.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini adapun data yang di perlukan adalah data primer dan data skunder:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara yang di lakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten pada Kantor Camat Pangean. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah di kumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna jasa sesuai dengan kebutuhan. Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dan menjadi arsip, dan data skunder dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Kantor Camat Pangean. Data ini digunakan sebagai pendukung untuk kelengkapan penelitian untuk membandingkan hasil wawancara dengan laporan yang di buat Kantor Camat Pangean.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2017:203) Observasi merupakan suatu proses yang untuk menghimpun kesatuan, suatu proses yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis. Di antaranya berupa proses-proses pengamatan dan ingatan.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yakni pada Kantor Camat Pangean.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka atau pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada responden yang berkompeten di kantor camat Pangean pada bidang keuangan. Dan mengumpulkan informasi dari responden yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi suatu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen laporan realisasi anggaran dan pengumpulan data yang di peroleh dimana penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan fakta yang berkenaan dengan topik

yang di teliti dan kemudian dilakukan pengkajian serta penelaanan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diamati.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 02 tentang Laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Pangean dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Tahapan analisis data :

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan.
4. Pengambilan Kesimpulan, berarti bahwa setelah data disajikan maka dilakukan suatu penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang resmi berdiri tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. Sebelumnya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan pemberlakuan UU Nomor 53 Tahun 1999 tersebut, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Kuantan Singingi sejak saat itu menjadi kabupaten defenitif di Provinsi Riau dengan ibukotanya Teluk Kuantan yang berjarak sekitar 168 km dari ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau

Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pangean**

##### **4.1.2.1 Sejarah Pangean**

Pangean adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Kecamatan ini dikenal dengan tradisi pacu jalur batang kuantan yang telah menjadi even pada kalender pariwisata nasional.

Pangean adalah suatu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pada awal era otonomi daerah, Pangean merupakan sebuah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuantan Hilir. Seiring dengan perkembangan zaman dan perjalanan waktu Pangean menjadi kecamatan dianggap layak untuk menjadi sebuah kecamatan yang definitif dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Satu hal yang tak bisa dipisahkan dengan Pangean adalah "Silat Pangean". Silat pangean merupakan sebuah seni bela diri yang lahir dan dipopulerkan secara turun temurun oleh guru-guru besar silat pangean (yang biasa dikenal dengan *Induak Barompek*) zaman dahulu, seni beladiri yang



dikenal dengan gerakannya yang lembut dan gemulai namun menyimpan akibat yang mematikan ini telah tersohor keseantero pelosok negeri baik di dalam maupun di luar Provinsi Riau. Hal ini menjadikan silat pangean menjadi sebuah seni beladiri yang sangat diminati untuk dipelajari oleh pemuda-pemuda yang berasal dari Pangean itu sendiri maupun yang berasal dari luar Pangean. Sebelum mendapatkan pelajaran pertama dari seni bela diri silat pangean ini terlebih dahulu calon murid harus mengikuti suatu seremoni yang biasa dikenal dengan "Maracik Limau". Secara umum silat pangean dapat dikelompokkan atas

1. Silek Tangan (silat tangan kosong)
2. Silek Podang (silat dengan menggunakan senjata pedang)
3. Silek Parisai (silat yang menggunakan senjata pedang dan perisai)

Disamping itu Pangean juga dikenal dengan makanan tradisionalnya yang mengundang selera. Sebut saja Lopek luo dan Lopek jantan (*semacam nagasari*), Puluik kucuang (*ketan yang dibungkus dengan daun pisang*), Lomang (*ketan yang dimasak di dalam bambu*), plus Canguak durian (durian yang diasamkan), Puti Mandi, dan Sarang Panyongek.

Adapun pejabat Kepala Kecamatan Pangean sampai sekarang sebagai berikut:

1. Drs. H. Masran Abdullah (1999-2000)
2. Suhendri, S. Sos (2000-2002)
3. Tarmizi Ramli, S.Sos., MM (2002-2005)
4. Yuyun Yosadi (2005-2006)
5. Japrinaldi, AP., M.Si (2006-2007)
6. Hendra, AP., M.Si (2007-2008)
7. Vria Yusrianto, S.Ip (2008)
8. Asmari, S.Sos., M.Si (2009-2011)

9. Novrion, S.Sos (2011-2013)
10. Mastur, SE (2014-2015)
11. Mahviyen Trikon Putra, SE (2015-2017)
12. Budi Asrianto, S.Sos., M.Si (2017)
13. Irhandi, S.Sos (2017)
14. Mahviyen Trikon Putra, SE ( 2018-sekarang)

#### 4.1.2.2 Letak Geografis

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pangean memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Benai
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kuantan Hilir dan Kuantan Hilir Seberang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat

#### 4.1.2.3 Letak Demografi

luas wilayah Kecamatan Pangean adalah 145,32 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 19,783 jiwa dan terdiri dari 17 desa/kelurahan yaitu :

**Tabel 4.1**  
**Nama dan Luas Daerah Menurut Desa/kelurahan di Kecamatan Pangean**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Koto Pangean	10
2.	Padang Kunik	4
3.	Padang Tanggung	3
4.	Pasar Baru	28,86
5.	Apuh Angit	5
6.	Pauh Angit Hulu	4,5
7.	Pembatang	8
8.	Pulau Deras	7,5

9.	Pulau Kumpai	3
10.	Pulau Rengas	1,43
11.	Pulau Tengah	3,5
12.	Rawang Binjai	9
13.	Sako	28
14.	Sukaping	1,5
15.	Sungai Langsung	12
16.	Tanah Bekali	10,03
17.	Teluk Pauh	6
Jumlah		145,32

Sumber : Camat Pangean, 2020

### **Visi dan Misi**

#### **Kantor Camat Pangean**

##### **VISI :**

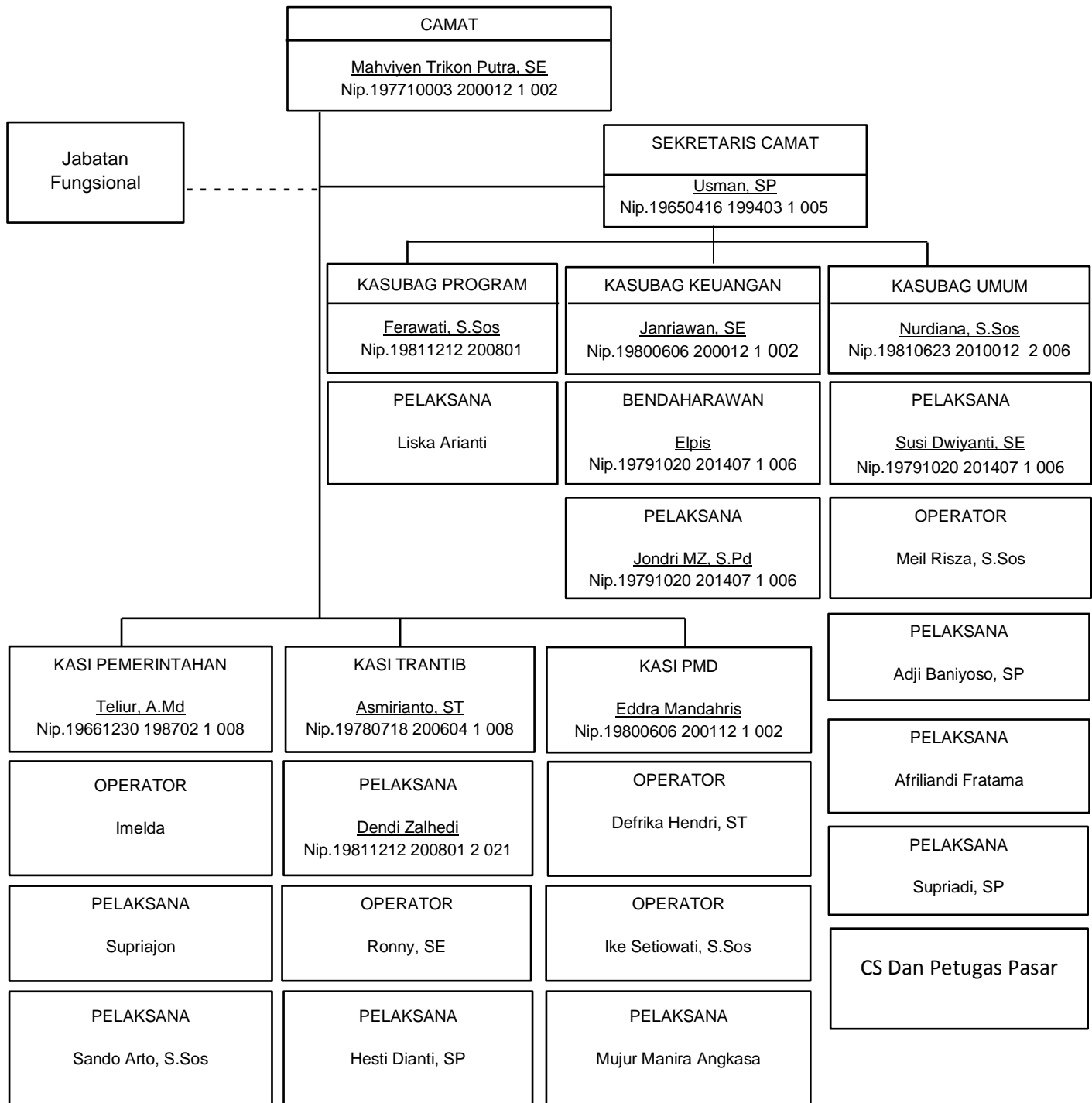
"Terwujudnya Pelayanan Prima, Profesional Dan Responsif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayaan"

##### **MISI :**

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Berlandaskan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Serta Iman Dan Taqwa (IMTAQ)
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Berbasis Kewilayaan.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial Budaya.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Pangean

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT PANGEAN**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Sumber : Kantor Camat Pangean, 2020

## **Tugas dan Wewenang**

### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati mengenai Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### **2. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi urusan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, perencanaan program, anggaran dan keuangan.

### **3. kasubag Program**

kepala sub bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### **4. Kasubag Keuangan**

Kepala sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

### **5. Kasubag Umum**

Kepala sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

#### 6. Kasi Pemerintahan

Kepala seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mencakup pengawasan, pelaksanaan, tugas pembuatan, kependudukan dan catatan sipil, pertahanan.

#### 7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIB)

Seksi TRANTIB mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pendapatan, perizinan, perhubungan, hukum dan perundang-undangan dan penanggulangan bencana.

#### 8. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Kepala seksi PMD mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, sosial, dan ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan dan Kawasan pemukiman, pasar, kebersihan dan pertamanan, koperasi, industri dan perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, promosi dan investasi, perencanaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, ekonomi dan pembangunan dan Kesejahteraan sosial.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Pangean Periode 2019

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Sementara Kantor Camat Pangean hanya menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode anggaran dan juga dibandingkan dengan realisasi anggaran ditahun sebelumnya.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2019 :

**Tabel 4.2**  
**Laporan Realisasi Anggran Tahun 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**KANTOR CAMAT PANGEAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian	Catatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018	%
<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1.	0,00	0,00	-	0,00
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a)1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Restribusi Daerah	5.1.1.a)2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	5.1.1.a)3)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dipisahkan					
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.a)4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.1.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1) a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.1.b.1) b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1) c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1) d)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>	5.1.1.b.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana penyesuaian	5.1.1.b.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	5.1.1.b.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana bagi hasil pajak dari provinsi	5.1.1.b.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana bagi hasil lainnya	5.1.1.b.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan hibah	5.1.1.c.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan lainnya	5.1.1.c.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	5.1.2	2.530.851.492,00	2.576.616.415,00	2.368.860.378,00	24,11
<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.a	2.530.851.492,00	2.576.616.415,00	2.368.860.378,00	24,11
Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.885.193.492,00	1.987.268.665,00	1.784.499.229,00	24
Belanja Barang	5.1.2.a.2)	645.658.000,00	589.347.750,00	584.361.149,00	0,21
Belanja hibah	5.1.2.a.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja social	5.1.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja keuangan	5.1.2.a.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tanah	5.1.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan Dan Mesin	5.1.2.b.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gedung Dan Bangunan	5.1.2.b.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	5.1.2.b.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja aset lainnya	5.1.2.b.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.c	-	0,00	0,00	0,00
Belanja tak terduga	5.1.2.c.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFER</b>	5.1.3	-	-	-	0,00
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA/</b>	5.1.3.a	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DESA</b>					
Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota/Desa	5.1.3.a.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>2.530.851.492,00</b>	<b>2.576.616.415,00</b>	2.368.860.378,00	<b>24,11</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>		<b>(2.530.851.492,00)</b>	<b>(2.576.616.415,00)</b>	<b>(2.368.860.378,00)</b>	<b>(24,11)</b>

Sumber : Kantor Camat Pangean

#### 4.2.2 Analisis Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Pangean Periode 2019

##### 1. Analisis Pendapatan LRA periode 2019

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Anggarannya**

Pendapatan Daerah	Tahun 2019		%	Tahun 2018
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)		Realisasi(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : (data diolah, 2020)

Realisasi pendapatan Kantor Camat Pangean sebesar Rp.0,00 dan atau tidak ada target anggaran pendapatan tahun 2019 maupun 2018.

##### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah kantor camat pangean merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMN atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp0,00.

## 1. Pendapatan Transfer

### a. Transfer pemerintah pusat

Pendapatan transfer – dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan alokasi khusus. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.0,00.

### b. Transfer pemerintah pusat lainnya

Penerimaan transfer lainnya dari pemerintah pusat tahun anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 yang berupa dana insentif daerah

### c. Transfer pemerintah pusat provinsi

Penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi di tetapkan dengan SKO Gubernur Riau yang realisasinya sesuai surat Kuat dari Biro keuangan Sekda Provinsi Riau yang Realisasiya Sebesar Rp.0,00

## 2. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan pendapatan lainnya. Realisasi untuk tahun 2019 sebesar Rp.0,00 yang diperoleh dari pendapatan hibah berupa dana penyesuaian sebesar Rp.0,00 dan dari pendapatan dna lainnya sebesar Rp.0,00.

## 2. Analisis Belanja LRA Periode 2019

**Tabel 4.4**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019**

Belanja Daerah	Tahun 2019			Tahun 2018
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)		Realisasi(Rp)
Belanja Operasi	2.530.851.492,00	2.576.616.415,00	24,11	2.368.860.378,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah	2.530.851.492,00	2.576.616.415,00	24,11	2.368.860.378,00
--------	------------------	------------------	-------	------------------

Sumber : (data diolah, 2020)

Realisasi belanja tahun 2019 mencapai Rp.2.576.616.415,00 atau 101,81% dari target sebesar Rp. 2.530.851.492,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp.207.756.037,00 dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.2.368.860.378,00

1) Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan social serta belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja operasi tahun 2019 sebesar Rp.2.576.616.415,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.530.851.492,00. Turun sebesar Rp.45.764.923,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran sebesar sebesar Rp. 2.368.860.378,00.

2) Belanja modal

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya dengan anggaran dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 dari realisasi sebesar Rp.0,00 dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.0,00.

3) Belanja tak Terduga

Selama tahun anggaran 2019 PEMDA Kuantan Singingi tidak merealisasikan untuk transaksi belanja tak terduga, meskipun tetap dianggarkan sebesar Rp.0,00 .

### 3. Analisis Transfer LRA Periode 2019

**Tabel 4.5**  
**Realisasi Transfer Tahun 2019**

Transfer	TA 2019		%	TA 2018
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)		Realisasi(Rp)
Transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : (data diolah, 2020)

Realisasi transfer tahun 2019 sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp. 0,00. dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp.0,00.

### 4. Analisis Surplus Defisit LRA Periode 2019

**Tabel 4.6**  
**Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2019**

Surplus/Defisit	TA 2019		%	TA 2018
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)		Realisasi(Rp)
Pendapatan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja daerah	2.530.851.492,00	2.576.616.415,00	24,11	2.368.860.378,00
transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit anggaran	(2.530.851.492,00)	(2.576.616.415,00)	24,11	(2.368.860.378,00)

Sumber : (data diolah, 2020)

Selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten kuantan singingi anggaran tahun 2019 menunjukkan surplus sebesar Rp. (2.576.616.415,00) dari anggaran defisit sebesar Rp. (2.530.851.492,00).

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Penyajian Laporan Realisai Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi

mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

Laporan Realisasi Anggaran pada laporan keuangan Kantor Camat Pangean disajikan dengan beberapa uraian diantaranya Pendapatan, Belanja, dan Transfer. Pendapatan dibedakan menurut jenisnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Belanja diklasifikasikan dengan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja tak Terduga. Transfer diklasifikasikan berdasarkan Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa.

**Tabel 4.7**  
**Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Pangean TA 2019 dengan PSAP No.02**

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tahun 2010	Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Pangean Tahun 2019	Ket
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>			
Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP No. 02 paragraf 8 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Tidak Sesuai

Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	PSAP NO. 02 paragraf 9 Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan.	Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan.	Sesuai
Periode pelaporan	PSAP No. 02 paragraf 10 Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Sesuai
Ketepatan waktu penyajian	PSAP NO. 02 paragraf 11 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Sesuai
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02 paragraf 13 Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:	Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja	Tidak Sesuai

	berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA	
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA</b>			
Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.	Pengakuan pendapatan pada laporan realisasi anggaran Kantor Camat Pangean yaitu pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.	Sesuai
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA</b>			
Penyajian dan pengungkapan	PSAP No. 02 paragraf 30 Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.	Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.	Sesuai

<b>AKUNTAN SI BELANJA</b>			
Pengukuran	PSAP No. 02 paragraf 44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.	Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.	Sesuai
<b>AKUNTANSI TRANSFER</b>			
Penyajian transfer masuk	PSAP No. 02 paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.	Kantor Camat Pangean mengelompokkan pendapatan transfer meliputi: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - d. Lainnya – LRA e. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA	Sesuai
<b>AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA</b>			
Penyajian surplus/defisit-LRA	PSAP No. 02 paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.	Surplus/Defisit-LRA adalah selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.	Sesuai



<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN</b>			
Penyajian pembiayaan	<p>PSAP No. 02 paragraf 50</p> <p>Pembiayaan (<i>financing</i>)</p> <p>Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.</p>		Tidak Sesuai
<b>AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)</b>			
Penyajian SiLPA/SiKPA	<p>PSAP No. 02 paragraf 61</p> <p>Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan- LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.</p>		Tidak Sesuai

Sumber : Arifah Yuniarti. 2019

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta didukung dengan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisis mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Camat Pangean, maka ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan bahwa Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Pangean hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

Hanya saja Kantor Camat Pangean tidak mencantumkan akun Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran. Akan tetapi akun pembiayaan nantinya akan di audit kemudian baru dibuatkan laporannya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan untuk akun Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tidak ada karena memang tidak ada kegiatan pada akun pembiayaan sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran akunnnya tidak dicantumkan.

#### **5.2 Saran**

1. Dalam hasil penelitian ini penulis memberikan saran dalam penyajian laporan realisasi anggaran harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 di dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 agar laporan realisasi anggarannya handal, kompeten,

berkualitas serta mempermudah para pengguna dalam memperoleh informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan serta mempermudah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam akuntabilitasnya terhadap anggaran.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya narasumber tidak hanya dari bidang akuntansi saja tetapi juga dari bidang anggaran, perbendaharaan, dan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga, Erlangga, Yogyakarta
- Fauziah, Ifat. 2018. Standar Akuntansi Pemerintahan. Edisi pertama, Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. " Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Morissan. 2012. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Yogyakarta: Alfabeta.
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Dasar. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2013. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Edisi kedua, Bandung: PT Refika Aditama.
- Setiawan, A. dan saryono. 2010. Metodologi Penelitian kebidanan. Jakarta. Nuha Medika.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia (vol 3), Jakarta: PT. Indeks.

### Jurnal

- Asmianti, Siti. 2015. Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *jurnal emba*, Vol.3 Hal. 418-425. Universitas Sam Ratulangi.
- Elbash, Cahaya & Utomo, Riyanto. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. *Issn:2621-0444*. Universitas Gresik.

Tulangow, A. P & Runtu, T. 2016. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, Vol. 4(3), pp. 564-671.

### **Skripsi**

Heriawati, Melly Simanihuruk. 2013, Skripsi, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan, Universitas HKBP Nommensen: Medan.

Maya, Yuni Safira. 2016. Penerapan PSAP No 02 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim: Malang.

Paidi. 2019. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Medan.

Sari, Wulan. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) PPNomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo.

Tina Djuitaningsih, Maulida Oktafani. 2011. Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

Rahmi, Nurul sandya. 2018. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Yuniarti, Arifah. 2019. Analisis Penerapan PSAP No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual



## PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	REALISASI 2018	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	5.1.1.	0.00	0.00	-	0.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.a.4)	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.a)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.1.b.1.b)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1.c)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1.d)	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.b.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.b.3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.1.1.b.3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.b.3)	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan lainnya	5.1.1.c.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA	5.1.2.	2,530,851,492.00	2,576,616,415.00	2,368,860,378.00	24.11
BELANJA OPERASI	5.1.2.a	2,530,851,492.00	2,576,616,415.00	2,368,860,378.00	24.11
Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1,885,193,492.00	1,987,268,665.00	1,784,499,229.00	24
Belanja Barang	5.1.2.a.2)	645,658,000.00	589,347,750.00	584,361,149.00	0.21
Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan	5.1.2.a.5)	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA MODAL	5.1.2.b	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tanah	5.1.2.b.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4)	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.c	-	0.00	0.00	0.00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.c.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFER	5.1.3.	-	-	-	0.00
TRANSFER / BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA/DESA	5.1.3.a	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa	5.1.3.a.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2,530,851,492.00	2,576,616,415.00	2,368,860,378.00	24.11
SURPLUS/(DEFISIT)		(2,530,851,492.00)	(2,576,616,415.00)	(2,368,860,378.00)	(24.11)

CAMAT PANGEAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGIMAHYIYEN TRIKON PUTRA, SE  
NIP. 19771003 200012 1 002

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

1. Apa standar akuntansi yang digunakan Kantor Camat Pangean dalam penyusunan Laporan Keuangan ?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan ? khususnya LRA.
3. Berapa banyak orang yang terlibat dalam penyusunan LRA ?
4. Apa saja kendala yang dialami selama penyusunan LRA supaya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ?
5. Apakah dalam LRA sudah menyajikan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran ?
6. Apakah LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding ?
7. Berapa kali LRA disajikan dalam satu tahun ?
8. Setelah tahun anggaran berakhir, butuh waktu berapa lama untuk menyajikan LRA ?
9. Bagaimana penyajian penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi LRA? apakah sudah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan?
10. Bagaimana LRA menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran?
11. Bagaimana LRA mengidentifikasi secara jelas tentang informasi yang dianggap perlu ? seperti nama entitas laporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan ?

12. Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, apakah alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan ?
13. Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, apakah dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan realisasi anggaran ?
14. Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, apakah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ?

#### **B. Akuntansi Anggaran**

1. Bagaimana penerapan akuntansi anggaran di Kantor Camat Pangean?

#### **C. Akuntansi Pendapatan**

1. Apakah pendapatn yang dimiliki dicantumkan secara terperinci ?
2. Bagaimana pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah ?
3. Bagaimana pencatatan transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa dalam LRA ?
4. Mengapa pendapatan LRA harus diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya ?
5. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan keuangan ?

#### **D. Akuntansi Belanja**

1. Apakah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah ?
2. Mengapa belanja yang telah dikeluarkan harus dicantumkan secara terperinci ?
3. Bagaimana meralisasikan belanja yang telah diklasifikasikan ? apakah harus



sesuai dengan jenis belanjanya ?

4. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan keuangan?

#### **E. Akuntansi Surplus/Defisit**

1. Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit ?

#### **F. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan**

1. Apakah penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah ?

#### **G. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran**

1. Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit ?

## Rekomendasi Saat Melakukan Penelitian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## I. Biodata Pribadi

Nama : Mifta Huljannah  
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Kuantan, 17 November 1997  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Nangka Lk 2 Jao Rt.002 Rw.001  
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan  
Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan  
Singingi  
Telepon : 0822-3495-9382  
Alamat Email : miftahuljannah1711@gmail.com

## II. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2009 lulus SDN 018 Koto Taluk
2. Tahun 2012 lulus SMPN 01 Teluk Kuantan
3. Tahun 2015 lulus SMPN 3 Teluk Kuantan
4. Tahun 2020 lulus Universitas Islam Kuantan Singingi

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 23 Oktober 2020

Mifta Huljannah  
NPM.160412040